

## **Analisis Pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap Manajemen Laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia**

Akuntansi

**Amirul Arif<sup>1\*</sup>, Agus Purwanto<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Tegal

\*Email : amirul.bin.afif@gmail.com

---

### **ABSTRACT**

*The objective of the research is to analyze the effect of Islamic Corporate Governance toward the earnings management of Islamic banks in Indonesia and Malaysia.. The populations of the research are some Islamic Banks located in Indonesia and Malaysia during the period of time 2012 until 2017. The total amount of samples in the research is 108. After conducting the tabulation of data stage, there is no outlier data, so that the amount of final samples remains 108. This research used data panel regression, Fixed Effect model. The result of the research showed that the meeting of Islamic supervisory council, audit committee's independence and the meeting of audit committee have significant effect toward the earnings management, meanwhile the number of Islamic supervisory council and audit committee do not have significant effect on the earnings management.*

**Keyword:** *Earnings management, Islamic Supervisory Council, Audit Committee*

---

### **PENDAHULUAN**

Dalam perekonomian, bank merupakan pihak yang berperan penting sebagai penghubung antara dunia usaha dan pemilik dana (Amir dan Rukmana, 2010). Selain menjadi penghubung, bank juga menjadi pembatas antar kedua pihak tersebut dikarenakan tidak adanya *transferability risk* dan *return*. Selain itu, perbankan konvensional sangat identik dengan sistem bunga yang menimbulkan efek negatif terhadap inflasi, investasi, produksi, dan kemiskinan seperti pada saat terjadinya krisis moneter pada tahun 1998. Perbankan konvensional yang masih mengandung unsur bunga yang dianggap riba oleh para ekonom muslim, sehingga menyebabkan didirikannya bank syariah yang secara filosofis meninggalkan masalah riba.

Dalam kawasan Asia Tenggara, Malaysia dan Indonesia merupakan dua negara dengan perkembangan perbankan dan keuangan syariah yang sangat pesat. Malaysia merupakan negara yang memimpin dalam hal sistem keuangan dan perbankan syariah di

kawasan Asia Tenggara. Pada tahun akhir tahun 2017, seperti yang dilansir dalam *finance.detik.com*, pangsa pasar perbankan syariah di Malaysia mencapai 40–50%. Sedangkan dari segi keberadaan bank syariah, terdapat 16 Bank Syariah dan 2 Bank Syariah Internasional di negara Malaysia. di Indonesia, Bank Umum Syariah mengalami peningkatan pangsa pasar perbankan syariah dari 4,8% di tahun 2016 menjadi 5% di tahun 2017. Jumlah Bank Umum Syariah juga mengalami peningkatan dari yang sebelumnya 12 menjadi 13 pada Januari 2017 berdasarkan data dari Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, pada Januari 2017, laba Bank Umum Syariah mengalami peningkatan hampir dua kali lipat dari tahun 2016 menjadi 2,5 triliun.

Perkembangan perbankan syariah saat ini memang masih jauh dari harapan. Pasar yang besar, jika melihat penduduk muslim yang merupakan terbesar di dunia, tak menjamin laju perkembangan perbankan syariah cepat. Bahkan, kinerja keuangan bank syariah tak sekinclong bank konvensional. Masalah *governance* atau tata kelola di bank syariah masih harus terus ditingkatkan, selain keandalan SDM syariah yang sering menjadi soal. Selama ini cita-cita untuk meraih *market share* di atas 5% memang sudah terpenuhi. Itu pun karena ada konversi bank umum konvensional menjadi syariah. Bukan karena *organic growth*, melainkan karena adanya konversi Bank BPD Aceh menjadi Bank Aceh Syariah dan sebentar lagi Bank NTB. Saat ini *market share* perbankan syariah sudah mencapai 8,26%.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Agensi

Teori agensi ialah teori yang melihat hubungan antara agen dan *principal*. *Principal* mendelegasikan wewenangnya kepada agen, dan agen melaksanakan wewenang tersebut untuk kepentingan *principal*. Teori ini mengasumsikan jika setiap individu akan mementingkan diri sendiri. Pemegang saham sebagai *principal* lebih berfokus pada hasil dari investasi mereka yang berkurang atau bertambah yang ditunjukkan dengan kinerja perusahaan. Sedangkan agen diasumsikan bekerja demi keuntungan dirinya sendiri (Hendriksen dan Breda, 1992).

Salah satu pengukuran kinerja agen adalah didasarkan pada pencapaian laba perusahaan. Dalam konteks manajemen laba, manajer selaku agen akan berusaha untuk mempercantik laporan keuangan agar kinerja perusahaan agen terlihat bagus. Dalam melakukan manajemen laba, agen akan memanfaatkan asimetri informasi yang ada.

Permasalahan keagenan yang terjadi di dalam bank syariah dapat diatasi dengan diterapkannya *Islamic Corporate Governance* (ICG). ICG dalam hal ini berperan penting

dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan dengan kepatuhan atas berbagai peraturan dan ketentuan yang sesuai syariat. Bagi pemegang saham ICG memberikan jaminan bahwa dana yang diinvestasikan pada perusahaan dikelola dengan baik dan akan memberikan returns yang memadai serta tidak menyimpang dari koridor islam.

Pengawasan merupakan upaya untuk memeriksa bahwa semua yang terjadi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, perintah yang dikeluarkan dan prinsip yang dianut, dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar tidak terulang di kemudian hari (Fayol dalam Harahap, 2011). Tujuan pengawasan ialah untuk memahami letak kesalahan demi perbaikan di masa mendatang dan mengarahkan seluruh kegiatan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana sehingga hasil yang diharapkan dapat maksimal (Manullang, 2001).

### HUBUNGAN ANTAR VARIABEL

Teori agensi menyatakan bahwa wewenang untuk menjalankan perusahaan diberikan oleh *principal* kepada agen. Dalam pelaksanaannya, terjadi konflik kepentingan antara agen dan *principal* tersebut, dimana agen memiliki kepentingan untuk dirinya sendiri yaitu mendapatkan bonus atas kinerja perusahaan, sehingga manajemen selaku agen akan mengelola laba untuk kepentingan sendiri. Adanya konflik kepentingan tersebut, dibutuhkan adanya fungsi pengawasan sehingga dapat meminimalisir konflik kepentingan yang terjadi.

Terdapat fungsi pengawasan pada perbankan syariah dikarenakan perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang berprinsip pada syariah, yaitu dewan pengawas syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada perbankan dan lembaga keuangan syariah. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, dewan pengawas syariah wajib mengikuti faktwa yang dikeluarkan DSN (Anggadini, 2015) Adanya dewan pengawas syariah yang memberikan pengawasan yang efektif, maka akan memperkecil terjadinya manajemen laba dikarenakan manajemen laba merupakan tindakan untuk mengelola laba agar kinerja keuangan terlihat bagus sehingga tidak sesuai dengan syariat.

Bedard *et al.* (2004) mengungkapkan bahwa jumlah dewan pengawas syariah merupakan faktor penting dalam efektivitas dewan pengawas syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Ben Othman dan Mersni (2015) menunjukkan ukuran dewan memiliki hubungan positif terhadap kemungkinan kecurangan laporan dan DLLP. Oleh karena itu, dewan pengawas syariah dengan ukuran atau jumlah anggota yang lebih besar dalam bank syariah, maka

manajemen laba yang terjadi lebih sedikit daripada dewan pengawas syariah yang berukuran lebih kecil. Sehingga hipotesis pertama dirumuskan:

**H1: Ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap manajemen laba**

Teori agensi menyatakan bahwa dalam pelaksanaan wewenang yang diberikan oleh *principal* kepada agen, terjadi konflik kepentingan yang diperparah dengan adanya asimetri informasi. Konflik kepentingan terjadi ketika kepentingan agen berbeda dengan kepentingan *principal*. Agen memiliki kepentingan untuk dirinya sendiri yaitu berupa bonus sehingga cenderung mengelola laba agar bonus yang diterima semakin besar. Dikarenakan perbankan syariah memiliki pengaturan yang berbeda dengan bank konvensional, dibentuklah dewan pengawas syariah sebagai fungsi pengawasan agar kegiatan operasional bank sesuai dengan prinsip syariah.

Peraturan Bank Indonesia No 11/33/PBI/2009 mengatur frekuensi rapat dewan pengawas syariah dalam paragraf 3 pasal 49 ayat 1, yaitu wajib dilaksanakan minimal 1 kali dalam 1 bulan. Hal ini dikarenakan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah yang besar terkait dengan kesesuaian operasional perusahaan dengan kepatuhan syariah. Rapat umumnya diadakan untuk mengevaluasi atau membahas permasalahan yang ada. Sehingga semakin sering rapat yang diadakan oleh dewan pengawas syariah, maka pengawasan terhadap prinsip syariah akan semakin optimal dan akan menurunkan manajemen laba. Dari penjelasan tersebut maka dapat dihipotesiskan:

**H2: Frekuensi rapat dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap manajemen laba**

Teori agensi menyatakan bahwa manajer selaku agen agar berusaha untuk mempercantik laporan keuangan sehingga kinerja perusahaan dan agen terlihat bagus. Untuk meminimalisir kemungkinan perilaku agen tersebut, dewan komisaris membentuk komite audit untuk memonitor pelaporan keuangan dan melaksanakan pengendalian internal. Jumlah anggota komite menggambarkan keefektifan dalam mengawasi pelaporan keuangan perusahaan. Koordinasi antara anggota komite audit memudahkan dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan audit internal dan pelaporan transaksi keuangannya.

Kolsi dan Grassa (2017) menyatakan bahwa semakin besar komite audit maka akan lebih efektif dalam memonitor tindakan manajer dibandingkan dengan komite audit yang kecil (beranggota sedikit). Dari penjelasan sebelumnya, maka dapat dihipotesiskan:

**H3: Ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba**

Teori agensi menyatakan bahwa manajemen lebih cenderung mementingkan kepentingannya sendiri sehingga terjadi konflik kepentingan. Independensi dibutuhkan untuk mengatasi konflik kepentingan. Komite audit bertindak sebagai pihak independen dalam menengahi hubungan agen dan prinsipal. Komite audit akan bertindak independen untuk menghasilkan hasil yang obyektif.

Menurut Klein (2002), komite audit yang independen mampu meningkatkan kualitas laba. Hal ini dikarenakan banyaknya komite audit yang tidak independen di suatu perusahaan berhubungan positif dengan manajemen laba. Semakin rendah persentase anggota independen komite audit maka peluang adanya manajemen laba semakin besar. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis kelima adalah:

#### **H4: Jumlah komite audit independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba**

Teori agensi menyatakan bahwa untuk mencegah terjadinya asimetri informasi dan kemungkinan agen atau manajemen melakukan *moral hazard*, sehingga diperlukan pengawasan dalam kegiatan manajemen. Komite audit bertindak sebagai pengawas proses pelaporan keuangan. Komite audit mengadakan pertemuan untuk membahas dan menyelesaikan masalah yang ada di perusahaan. Rapat yang sering dilakukan membuat komite audit selalu *update* terhadap permasalahan yang terjadi. Hal ini akan mempercepat proses penyelesaian masalahnya. Dalam peraturan Bank Indonesia mengenai tata kelola Bank Umum Syariah, tidak disebutkan jumlah rapat yang harus dijalankan oleh komite audit pada bank umum syariah.

Beasley *et al.* (2000) menyatakan bahwa pada perusahaan yang bermasalah umumnya dikarenakan kurangnya rapat yang diadakan oleh komite audit. Hal yang sama juga diungkapkan Abott dan Parker (2000) bahwa rendahnya frekuensi rapat komite audit kemungkinan besar akan dikenai sanksi oleh SEC karena masalah pelaporan keuangan. Komite audit yang melakukan pertemuan secara reguler lebih mungkin untuk mendeteksi kelemahan pengendalian internal (Krishnan and Visvanathan, 2007). Berdasarkan uraian diatas, hipotesis keenam adalah:

#### **H5: Frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba**

### **METODE PENELITIAN**

#### **Desain Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, menurut Fauzi (2009, p. 18) yang disebut penelitian kuantitatif adalah "*penelitian yang proses analisisnya menekankan data*

berupa angka-angka yang diolah dengan metode statistika". Lebih jauh penelitian ini termasuk studi empiris yang ditujukan untuk menganalisis pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap Manajemen Laba.

### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) yang ada di Indonesia dan Malaysia. Seluruh Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia dan Malaysia Statistik sampai dengan tahun 2017, berjumlah 29 BUS. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling*. Sampel yang diambil sebanyak 18 bank selama 6 tahun.

### Pengukuran Variabel

Untuk melakukan pengukuran variabel di atas sebagai berikut:

**Tabel 1. Pengukuran Variabel**

Variabel	Definisi	Pengukuran
Ukuran DPS	didefinisikan sebagai dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.	Ukuran DPS didalam perusahaan
Variabel	Definisi	Pengukuran
Rapat DPS	didefinisikan sebagai dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.	Frekuensi rapat DPS dalam setahun
Ukuran Komite Audit	Komite audit adalah komite yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas dewan komisaris.	Ukuran komite audit didalam perusahaan
Independensi Komite Audit	Komite audit adalah komite yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas dewan komisaris.	Komite audit independen dibagi dengan total komite audit
Rapat komite audit	Komite audit adalah komite yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas dewan komisaris.	Frekuensi rapat komite dalam setahun

Sumber : Data diolah, 2019

### Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2016) Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan deskripsi data dari seluruh variabel yang akan dimasukkan dalam model penelitian yang dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (mean) dan standar deviasi. Tuju-

an dari analisis deskriptif untuk melihat distribusi dan perilaku dari data yang digunakan untuk penelitian.

### Uji Asumsi Klasik

Dalam mendukung analisis regresi berganda perlu adanya uji asumsi klasik untuk menghindari terjadinya estimasi yang bias, karena tidak semua data dapat diterapkan regresi. Penelitian ini menggunakan 4 uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

### Pengujian Hipotesis

Metode analisis data yang digunakan dalam menguji hipotesis penelitian ini adalah regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda ini untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun persamaan regresi sebagai berikut:

$$DLLP = \alpha + \beta_1 \text{ SIZE\_DPS} + \beta_2 \text{ MEET\_DPS} + \beta_3 \text{ SIZE\_AC} + \beta_4 \text{ IND\_AC} + \beta_5 \text{ MEET\_AC} + \beta_6 \text{ SIZE\_BANK} + \epsilon_{it}$$

Dimana:

DLLP = Manajemen laba

SIZE\_DPS = Ukuran dewan pengawas syariah

MEET\_DPS = Frekuensi rapat dewan pengawas syariah

SIZE\_AC = Ukuran komite audit

IND\_AC = Independensi komite audit

MEET\_AC = Frekuensi rapat komite audit

SIZE\_BANK = Ukuran bank

$\epsilon_{it}$  = Error

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Analisis Statistik Deskriptif

Pengujian analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan data yang digunakan dengan maksud untuk menguji hipotesis. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yaitu nilai maksimum, minimum, modus, dan deviasi standar.



Tabel 2. Statistik Deskriptif Gabungan

Variabel Penelitian	<i>Modus</i>	<i>Maximum</i>	<i>Minimum</i>	<i>Std. Deviation</i>	<i>Observation</i>
DLLP	-0,015	0,057	-0,786	0,129201	108
SIZE_DPS	5	7	2	1,359	108
MEET_DPS	12	26	5	4,246	108
SIZE_AC	3	7	2	1,103	108

  

Variabel Penelitian	<i>Modus</i>	<i>Maximum</i>	<i>Minimum</i>	<i>Std. Deviation</i>	<i>Observation</i>
IND_AC	1	1,00	0,33	0,21255	108
MEET_AC	12	24	7	3,942	108
SIZE_BANK	16,46	19,0761	14,2868	1,1938	108

Sumber : Data diolah, 2019

## PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa H1 ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa ukuran DPS yang dimiliki oleh bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia tidak memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap terjadinya manajemen laba. Hasil ini tidak sesuai dengan teori agensi yang menyatakan bahwa adanya pengawasan yang efektif dari dewan pengawas syariah, maka dapat meminimalisir konflik kepentingan yang terjadi antara principal dan agent. Tidak adanya pengaruh yang signifikan dari ukuran dewan pengawas syariah terhadap manajemen laba dapat disebabkan karena adanya ketidakseimbangan antara ukuran dewan pengawas syariah di Indonesia dan Malaysia.

Berdasarkan hasil statistik deskriptif gabungan pada tabel 2 rata-rata dewan pengawas syariah terdiri dari 4 orang. Di Indonesia, dewan pengawas syariah minimal terdiri dari 2 orang, sedangkan di Malaysia dewan pengawas syariah minimal terdiri dari 3 orang. Selain itu, kualifikasi untuk dewan pengawas syariah di Indonesia dan Malaysia sangatlah berbeda. di Indonesia, ketentuan mengenai kompetensi dewan pengawas syariah sangatlah bersifat umum sedangkan di Malaysia, ketentuan mengenai kompetensi dewan pengawas syariah sangatlah terperinci.

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa H2 diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa frekuensi rapat DPS yang dilakukan oleh bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia mempunyai pengaruh negatif terhadap terjadinya manajemen laba. Semakin sering DPS melakukan pertemuan rapat maka akan semakin menurunkan tingkat manajemen laba yang terjadi.

Rapat umumnya diadakan untuk mengevaluasi atau membahas permasalahan yang ada. Sehingga semakin sering rapat yang diadakan oleh dewan pengawas syariah, maka



pengawasan terhadap prinsip syariah akan semakin optimal dan akan menurunkan manajemen laba. Hal ini sejalan dengan teori agensi. Teori agensi menyatakan bahwa terdapat konflik kepentingan antara principal dan agent dan konflik tersebut dapat diperparah dengan adanya asimetri informasi, sehingga untuk mengatasi konflik kepentingan tersebut diperlukan mekanisme pengawasan. Dewan pengawas syariah dalam bank umum syariah bertindak sebagai fungsi pengawasan terutama berkaitan dengan kepatuhan syariah. Rapat yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah memungkinkan terjadinya pertukaran informasi sehingga dapat meminimalisir asimetri informasi.

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa H3 ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa ukuran komite audit pada bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia tidak mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba. Tidak adanya pengaruh ukuran komite audit terhadap manajemen laba dapat disebabkan oleh ketidakjelasan bentuk manajemen laba yang dilakukan oleh bank umum syariah mengingat bank umum syariah memiliki transaksi yang berbeda dengan bank konvensional. Dari hasil penelitian ini juga dapat memungkinkan bahwa manajemen laba akan semakin meningkat seiring dengan semakin banyaknya anggota komite audit.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori agensi. Teori agensi mengasumsikan bahwa manajer selaku agen akan berusaha untuk mempercantik laporan sehingga kinerja perusahaan terlihat menarik dan kinerja agent pun dapat dipandang bagus. Untuk meminimalisir hal tersebut, dewan komisaris membentuk komite audit untuk memonitor pelaporan keuangan dan melaksanakan pengendalian internal. Jumlah anggota komite audit yang proporsional dapat mempermudah koordinasi antar anggota komite audit. Namun, dikarenakan bank umum syariah memiliki transaksi yang berbeda dengan bank konvensional sehingga terdapat ketidakjelasan mengenai bentuk manajemen laba yang dilakukan oleh bank umum syariah.

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa H4 diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak anggota komite audit yang independen dalam bank umum syariah, maka akan menurunkan manajemen laba. Independensi berkaitan dengan objektivitas. Ketika anggota komite audit sebagian besar merupakan anggota yang independen, diharapkan pengawasan yang dilakukan oleh komite audit akan objektif sehingga dapat mengurangi tingkat manajemen laba yang terjadi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori agensi. Teori agensi menyatakan bahwa manajemen lebih cenderung mementingkan kepentingannya sendiri sehingga terjadi konflik

kepentingan. Komite audit bertindak sebagai pihak independen dalam menengahi hubungan agen dan principal. Komite audit yang independen dapat memberikan hasil pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal yang obyektif sehingga dapat mengurangi manajemen laba yang terjadi.

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa H5 diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi frekuensi rapat komite audit pada bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia maka akan semakin menurunkan atau mengurangi manajemen laba. Semakin sering komite audit bertemu, semakin banyak umpan balik diberikan pada proses pelaporan dan penyusunan laporan keuangan, dan semakin kecil kemungkinan manajer memanipulasi akrual diskresioner melalui LLP sehingga menurunkan terjadinya manajemen laba. Saleh et al. (2007) melaporkan bahwa karakteristik komite audit dan frekuensi rapat memantau perilaku manajemen sehubungan dengan insentif untuk mengelola pendapatan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori agensi yang bahwa dalam pelaksanaan wewenang yang diberikan oleh principal kepada agen, terjadi konflik kepentingan yang dapat diperparah dengan adanya asimetri informasi dan moral hazard. Komite audit bertindak sebagai pengawas proses pelaporan keuangan. Komite audit mengadakan pertemuan untuk membahas dan menyelesaikan masalah yang ada di perusahaan. Rapat yang sering dilakukan oleh komite audit dapat memberikan manfaat yaitu selalu update terhadap permasalahan yang terjadi.

## **KESIMPULAN**

Berikut ini disajikan kesimpulan yang merupakan hasil analisis dari bab-bab sebelumnya.

- 1) Ukuran DPS pada bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia secara negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat manajemen laba yang terjadi.
- 2) Frekuensi rapat DPS pada bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia secara negatif dan signifikan terhadap tingkat manajemen laba yang terjadi.
- 3) Ukuran komite audit pada bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia secara negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat manajemen laba yang terjadi.
- 4) Independensi komite audit pada bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia secara negatif dan signifikan terhadap tingkat manajemen laba yang terjadi.
- 5) Frekuensi rapat komite audit pada bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia secara negatif dan signifikan terhadap tingkat manajemen laba yang terjadi.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul R, R. dan Ali, F.H.M. 2006. "Board, audit committee, culture and earnings management: Malaysian evidence." *Managerial Auditing Journal*, Vol. 21 No. 7, pp. 783-804
- Ali, A., Kabir, H.M. dan Syed A, B. 2015. "Loan loss provisioning in OIC countries: evidence from Conventional vs Islamic Banks", *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, Vol. 28 No. 1, pp. 23-59
- Alkdai, H. H., dan Hanefah, M. M. 2012. "Audit committee characteristics and earnings management in Malaysian Shariah-compliant companies". *Business and Management Review*, Vol. 2, No. 2, pp. 52-61
- Amir, M. dan Rukmana. 2010. *Bank Syariah, Teori, kebijakan, Dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga
- Anhara. 2015. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Laba (Studi Pada Perusahaan Perbankan Syariah di Indonesia)". *Jurnal Tekun*, Vol.VI, No. 01, Hal. 128-150
- Anggadini, D. 2015. "Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia Terhadap Bank Syariah", *Majalah UNIKOM*, Vol.12, No. 1, hal. 81
- Ascarya. 2006. *Akad dan Produk Bank Syariah : Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*. Jakarta: Bank Indonesia
- Bedard, J., Chtourou, S.M. dan Courteau, L. 2004. "The effect of audit committee expertise, independence, and activity on aggressive earnings management." *Auditing: A Journal of Practice dan Theory*, Vol. 23 No. 2, pp. 13-35
- Ben O, H. dan Mersni, H. 2014. "The use of discretionary loan loss provisions by Islamic banks and conventional banks in the Middle East region: a comparative study", *Studies in Economics and Finance*, Vol. 31 No. 1, pp. 106-128
- Ben O, H. dan Mersni, H. 2015. "The impact of corporate governance mechanisms on earnings management in Islamic banks in the Middle East region", *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 7 No. 4, pp. 318-348
- Boulila, N., Zouari, S. dan Boudrigua, A. 2010. "Do Islamic banks use loan loss provisions to smooth their results?", *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 1 No. 2, pp. 114-127
- Buniamin, S.J.N.H., Raida A.R.N, dan Abdul Rauf, Fatimah Hanim. 2012. "Board diversity and discretionary accruals of the top 100 Malaysia corporate governance (MCG) index company." *African Journal of Business Management*, Vol.6 (29), pp. 8496-8503

- Cornett, M., Marcus, A.J. dan Tehranian, H. 2008. "Corporate governance and pay-for-performance: the impact of earnings management", *Journal of Financial Economics*, Vol. 87 No. 2, pp. 357-375
- Deegan, C. 2004. *Financial Accounting Theory*. New South Wales: McGraw-Hill Australia
- El D.M.. 2018. *Introduction to Earnings Management*. Switzerland: Springer
- Furlong, N.E., Lovelace, E.A., dan Lovelace, K.L. 2000. *Research Methods and Statistics: an Integrated Approach*. USA: Harcourt Brace and Company
- Ghayad, R. 2008. "Corporate governance and the global performance of Islamic banks." *Humanomics*, Vol. 24 Issue: 3, pp.207-216
- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : BPUNDIP
- Grassa, R. and Matoussi, H. 2014. "Corporate governance of Islamic banks: a comparative study between GCC and Southeast Asia countries", *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 7 No. 3, pp. 346-362
- Klein, A. 2002. "Audit committee, board of director characteristics, and earnings management." *Journal of Accounting and Economics*, Vol.33 No.3, p. 375-400
- Kodriyah, S.N.S, dan Octaviani, S. 2017. "Peran Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, dan Dewan Komisaris dalam Mendeteksi Praktik Manajemen Laba". *Jurnal Akuntansi*. Vol. 4, No. 2
- Kolsi, M.C, dan Grassa, R. 2017. "Did Corporate governance mechanism affect earnings management? Further evidence from GCC Islamic Banks". *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 10 No 1, p. 2-23
- Lafond, R. dan Roychowdhury, S. 2008. "Managerial ownership and accounting conservatism." *Journal of Accounting Research*, Vol.46 No.1, p. 101-135
- Manullang, M. 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada Press
- Al-Nasser M.S.A.S. dan Jorih M. 2017. "The relationship between agency theory, stakeholder theory and Shariah supervisory board in Islamic banking: An attempt towards discussion." *Humanomics*, Vol. 33 Issue: 1, pp.75-83
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta : UUP STIM YKPN
- Mulford, C.W. dan Comiskey, E.E. 2002. *The Financial Numbers Games: Detecting Creative Accounting Practices* . New York: John Wiley dan Sons
- Quttainah, M.A., Song, L. dan Wu, Q. 2013. "Do Islamic banks employ less earnings management?" *Journal of International Financial Management dan Accounting*, Vol. 24 No. 3, pp. 203-233

- Rama, A dan Novela, Y. 2015. “*Shariah governance* dan kualitas tata kelola perbankan syariah”. *SIGNIFIKAN: Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 4 No. 10
- Rizqiani, D., & Yulianto, A. (2020). The implementation of sharia audit process, implication of sharia regulatory and human resource aspects. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 2(1), 51. <https://doi.org/10.21580/jiafr.2020.2.1.5220>
- Saleh, N.M..I.T.M., dan Rahmat, M.M. 2007. “Audit Committee Characteristics and Earning Management: Evidence from Malaysia”. *Asian Review of Accounting*. Vol. 15, No. 2, pp. 147-163
- Suryanto, T. 2014. “Manajemen Laba pada Bank Syariah di Indonesia: Peran Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah”. *KINERJA*. Vol. 18, No. 1, Hal. 90-100
- Vafeas, N. 2005. “Audit committees, boards and the quality of reported earnings.” *Contemporary Accounting Research*, Vol.22 No.4, p. 1093-122.
- Xie *et al.* 2003. “Earnings management and corporate governance: The role of the board and audit committee.” *Journal of Corporate Finance*, Vol.9 No.3, p. 295-316